

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **A. KEDAULATAN RAKYAT**

##### **1. Sejarah Singkat Kedaulatan Rakyat**

Proses kelahiran dan keberadaan Surat Kabar Kedaulatan Rakyat berawal dari tekanan Belanda dan juga Jepang terhadap pemuda Yogyakarta yang bekerja di Harian Sinar Matahari. Pemuda-pemuda itu diantaranya adalah Bramono (mantan Pemimpin Redaksi Sedyo Tama), serta Soemantoro dan Samawi (seorang wartawan dan guru Taman Siswa). Tekanan itu membuat para pemuda terbakar semangat perjuangannya untuk menggaungkan perjuangan rakyat Indonesia, khususnya untuk menggaungkan informasi Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.

Namun, di tengah perjuangannya untuk menggaungkan perjuangan rakyat Indonesia, Harian Sinar Matahari terpaksa disegel untuk menghindari terjadinya manipulasi informasi oleh Jepang yang sempat menjajah Indonesia saat itu. Penyegelan tersebut ternyata memberikan dampak yang sama buruknya bagi masyarakat Yogyakarta. Masyarakat Yogyakarta menjadi buta akan informasi luar maupun dalam negeri. Hal ini membuat Bramono, Soemantoro dan Samawi berjuang untuk membuka segel Kantor Sinar Matahari dan menerbitkan surat kabar pengganti.

Pada tanggal 26 September 1945, surat kabar pengganti sudah dipersiapkan untuk diluncurkan kepada masyarakat. Namun, ada satu hal yang masih kurang, yakni nama dari surat kabar itu sendiri. Samawi dan Soemantoro pun menghadap ke Ketua KNI Daerah Yogyakarta saat itu, Soedarisman Poerwokoesoemo untuk memintakan nama bagi surat kabar yang akan terbit tersebut.

Kedaulatan Rakyat adalah nama yang akhirnya dipilih oleh Soedarisman. Maka pada Hari Kamis Kliwon, 27 September 1945, tepatnya 40 hari setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Kedaulatan Rakyat resmi didirikan dan menempati bekas Kantor Sinar Matahari yang terletak di Jalan Malioboro, utara Gedung DPRD DIY.

Keberadaan Surat Kabar Kedaulatan Rakyat pun disambut baik oleh masyarakat Yogyakarta. Hal ini terbukti dari terjual habisnya 2.000 eksemplar Surat Kabar Kedaulatan Rakyat di hari pertama berdirinya, 3.000 eksemplar di hari kedua, dan 4.000 eksemplar di hari ketiga.

Struktur Organisasi Surat Kabar Kedaulatan Rakyat di awal berdiri:

Pemimpin Umum : Bramono  
Pemimpin Redaksi : Soemantoro  
Wakil Pemred : Samawi  
Staf Redaksi : Djojosoepadmo dan Mardisisworo

## **2. Visi dan Misi Kedaulatan Rakyat**

Sebagai korannya rakyat, kedaulatan rakyat dibesarkan oleh rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah sehingga punya komitmen berbuat baik untuk rakyat. Memiliki visi dan misi sebagai berikut:

Visi: Sebagai sumber informasi bagi masyarakat, kedaulatan rakyat ingin menyebarkan informasi dengan cepat dan tepat sasaran. Oleh karena itu jurnalis Kedaulatan Rakyat siap untuk mencari informasi dan mengolahnya secara objektif dan berimbang menjadi lembaran-lembaran berita.

Misi: menjadi media yang menyajikan informasi yang aktual dan terbaik bagi pembacanya. Untuk memenuhi selera para pembaca kedaulatan rakyat menggunakan bahasa yang lugas dan gampang dicerna oleh pembacanya, karena Kedaulatan Rakyat menyadari bahwa pembacanya berasal dari berbagai kalangan dan lapisan masyarakat dengan tingkat pendidikan yang berbeda pula.

### **3. Logo Kedaulatan Rakyat**



#### **4. KRJogja.com**

*KRJogja.com* merupakan divisi usaha dari Media Kedaulatan Rakyat Group yang bergerak di bidang pemberitaan media online di Jogja. Surat KABar KEdaulatan Rakyat (KR) sendiri merupakan media massa tertua di Indonesia yang masih hidup. KR mulai terbit sejak 27 September 1945 atau 40 hari setelah Indonesia merdeka. Brand KR sangat dikenal oleh masyarakat di Daerah istimewa Yogyakarta serta Jawa Tengah. Secara survey nasional, KR adalah media lokal dengan jumlah pembaca terbanyak di Indonesia.

*KRJogja.com* sebagai media KR Online sendiri didirikan pada tanggal 1 Juni 2009, dengan alamat [www.KRJogja.com](http://www.KRJogja.com). Pada awalnya website kedaulatan rakyat ini hanya berisikan berita Jogja yang diambil dari media cetak Surat Kbar Harian Kedaulatan Rakyat, dengan alamat website [www.kr.co.id](http://www.kr.co.id). Sampai dengan 1 Juni 2009 barulah menambahkan pemberitaannya dengan edisi News Aktual beserta kanal-kanal lainnya.

*KRJogja.com* memiliki beragam konten berita, yang terbagi dalam beberapa kanal dan berisi beberapa sub kanal, diantaranya:

- Kanal DIY
- Kanal Jawa Tengah
- Kanal Peristiwa
- Kanal Pendidikan
- Kanal Ekonomi
- Kanal Ragam
- Kanal Olahraga

- Kanal Gaya Hidup
- Kanal Wisata
- Kanal Hiburan
- Kanal Angkringan
- Kanal Kolom

*KRJogja.com* diluncurkan pada tanggal 1 Juni 2009 dan merupakan cikal bakal bisnis online pertama PT. BP. Kedaulatan Rakyat Group. Pembaca *KRJogja.com* meliputi professional, karyawan kantor, pengusaha, politisi, pelajar dan ibu rumah tangga. Konten berita *KRJogja.com* ditulis bukan sekedar memberikan informasi berita, tidak sekedar soal kecepatan namun kedalaman informasi sebagai respon terhadap kebutuhan masyarakat.

Selain itu konsep portalonline juga semakin menjadi pilihan masyarakat karena sifatnya yang *up-to-date* dan melaporkan kejadian peristiwa secara instan pada saat itu juga. Masyarakat tidak perlu menunggu sampai esok untuk membaca berita yang terjadi.

Struktur Organisasi *KRJogja.com* di Tahun 2018:

Pimpinan Umum : Dr. Gun Nugroho Samawi

General Manager : Feri A.K Pribadi

Pimpinan Redaksi : Agung Purwandono

Redaktur : Tomi Sujatmiko

Ivan Aditya

Agus Sigit

Danar Widiyanto

AB Pras

Reporter : FX Harminanto

Ilham Dary Athalah

Lintang Fajar Nugrahani

Lucia Yuriko

Satriyo Wicaksono

Sekretaris Redaksi : Sutami Dwiantara

## **B. FILM DI YOGYAKARTA**

Penulis-penulis awal beranggaan perusahaan film pertama milik pribumi berada di Yogyakarta, yang didirikan pada tahun 1948, yang bernama Hiburan Mataram *Stiching* yang mendahului Perusahaan Film Nasional yang didirikan oleh Usmar Ismail (1950). Perusahaan ini dipimpin oleh mantan pejabat Jepang yang menjadi warga Negara Indonesia, bernama Hinatsu Heitaro dan mengubah namanya menjadi Dr. Huyung. Perusahaan ini mendapat modal dari Bank Indonesia. Perusahaan ini hanya membuat empat film dan lenyap setelah kematian Dr. Huyung pada tahun 1952 (Sen, 2013: 38).

Perfilman di Yogyakarta tumbuh dan berkembang lagi pasca Orde Baru, era Reformasi. Perfilman di Yogyakarta tumbuh dalam semangat komunitas dalam situasi paradoks dimana ruang ekspedisi film yang kian terbatas pasca krisis moneter pada tahun 1997 dan gerusan industri televisi swasta, maupun tumbuhnya pembajakan film karena masifnya kebutuhan *home video* yang murah (Aryanto, 2015: 16). Sesungguhnya motor penggerak utama kebangkitan sinema Indonesia adalah komunitas film. Di tengah ketidakstabilan itu muncul komunitas-komunitas film diberbagai daerah yang menjadi ruang kreatif baru dan mendorong kelahiran pembuatan film, diskusi, pemutaran dan festival. Inilah demokratisasi film Indonesia yang didorong oleh euforia kebebasan berpendapat dan difasilitasi oleh teknologi digital yang relatif mudah dioperasikan dengan biaya murah (Nugroho dan Herlina, 2013: 364). Ifa Isfansyah salah satu Founder Fourcolours Films (dalam Arifianto dan Junaedi, 2016) mengatakan bahwa sebelum tahun 1998 Jogja hanya menjadi *supporting* di bidang keaktoran dan

lokasi syuting. Semua tim teknis dan peralatan dari Jakarta. Begitu juga Sutradaranya. Pada saat itu masih sangat minim informasi tentang film. Salah satu alasan itulah yang menyokong pembuatan film di Yogyakarta yang berbasis komunitas.

Komunitas film lahir pasca 1998 dan menjadi muara apresiasi dan kreativitas film di berbagai daerah, sehingga melahirkan ruang diskusi, workshop, festival dan penciptaan beragam film (Nugroho dan Herlina, 2013: 361). Komunitas film inilah yang mencarikan hibah pendanaan, pelatihan ketrampilan membuat film, pemutaran khalayak, hingga media kritik dan penilaian. Komunitas film di Yogyakarta berasal dari berbagai kalangan baik yang berbasis kampus maupun diluar kampus, seperti kineclub yang berbasis kampus dan umumnya menjadi Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), contohnya Universitas Gadjah Mada (UGM), Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta, Akademi Pembangunan Masyarakat Desa (APMD), Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY), Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Universitas Islam Negeri (UIN) Yogyakarta. Adapun komunitas apresiasi dan kajian film yang tidak berbasis kampus, seperti De Javu, Kinoki, Montase, Rumah Sinema, Forum Film Dokumenter (sebelum 2013 disebut Komunitas Dokumenter, penyelenggara Festival Film Dokumenter), serta kelompok yang lebih fokus pada produksi film, seperti Limaenam Films, Studio Kasat Mata, Fourcolours Films (Herlina dkk, 2015: 10).

Bisa dikatakan bahwa rentang 1998 sampai hari ini perfilman di Yogyakarta tumbuh secara organik yang berawal dari dunia pendidikan tinggi dan kini mulai

merambah ke pendidikan menengah. Beberapa generasi penggiat film yang lahir pada zaman reformasi antara lain sutradara seperti Fajar Nugross, Hanung Bramantyo, Ifa Isfansyah, Lexy J. Rambadetta hingga generasi Yosep Anggi Noen atau Ismail Basbeth. Selain sutradara juga tumbuh produser muda seperti Ajish Dibyo (Aryanto, 2015: 17).

Selain komunitas faktor lain yang menyokong perfilman di Yogyakarta adalah festival. Festival film pun menjamur di Kota Yogyakarta baik tingkat nasional maupun internasional. Jauh sebelum menjamurnya festival-festival yang ada di Yogyakarta, kota ini pernah tercatat sebagai tuan rumah dalam pagelaran Festival Film Indonesia yang ke-15 pada tanggal 4-8 Agustus 1984 (Aryanto, 2015: 25). Diantara banyak festival yang menjamur di Kota Pendidikan ini ada 3 festival yang konsisten dalam penyelenggaraannya, yaitu Festival Film Dokumenter (FFD). FFD pertama kali diselenggarakan pada Desember 2002 oleh Komunitas Dokumenter kemudian berubah menjadi Forum Film Dokumenter pada tahun 2013. Organisasi yang memiliki fokus pada film dokumenter di Indonesia ini bersifat nonprofit. Tujuan organisasi ini membangun infrastruktur film dokumenter melalui penelitian, workshop, arsip, pemutaran, produksi dan festival. Festival ini merupakan festival film dokumenter pertama di Asia Tenggara (Tentang Festival, 2017). Festival ini didirikan oleh “anak gelanggang yaitu Gelanggang Audio Visual Universitas Gadjah Mada (GLAV UGM) dan Tembi Rumah Budaya (Tembi) melalui sosok Herlambang Yudho (GLAV) sebagai ketua penyelenggara yang pertama dan Norbertus Nuranto serta Ons Utoro dari Tembi (Arsip FFD dalam Aryanto, 2015: 48)

Yang kedua adalah Jogja NETPAC Asian Film Festival (JAFF). JAFF didirikan pada tahun 2006. Selain mempromosikan sinema Asia pada publik Indonesia, tujuan festival ini juga menciptakan ruang pertemuan berbagai sektor, seperti seni, budaya dan pariwisata. Sejak berdirinya, JAFF bekerjasama dengan sebuah organisasi film dan budaya yang anggotanya berasal dari 30 negara, yaitu NETPAC (Networking for the Promotion of Asian Cinema) (About JAFF, 2017).

Selanjutnya ada Festival Film Pelajar Yogyakarta (FFPJ). FFPJ dimulai pada tahun 2010. Festival ini bermaksud menciptakan ruang belajar bersama, *sharing*, ruang pertemuan komunitas dan kompetisi film bagi pelajar tingkat sekolah menengah atas dan setara yang memiliki cakupan nasional (Aryanto, 2015: 4).

Melalui festival setempat pula para sineas dari Yogyakarta mampu menembus festival internasional yang berada di luar negeri. Diantaranya mengutip Nugroho dan Herlina (dalam Herlina dkk, 2015: 11) Ifa Isfansyah (Busan Internasional Film Festival serta International Film Festival Rotterdam 2011 dan 2013), Yosep Anggie Noen (International film Festival Rotterdam 2013 dan 2014 serta Busan International Film Festival), dan Ismail Basbeth (International Documentary Film Festival Amsterdam 2013 dan International Film Festival Rotterdam 2015). Di kesempatan lain ada Kamila andini pada tahun 2012 lewat filmnya *The Mirror Never Lies* yang masuk Berlin Film Festival.

Di Yogyakarta sendiri kurang lebih terdapat lima bioskop komersial, yaitu *Studio 21*, *Empire XXI*, *CGV Blitz*, *Cinemaxx*. Semua bioskop tersebut terletak di dalam pusat pembelajaran atau mall kecuali Empire XXI. Selain bioskop komersial terdapat pula bioskop alternatif (*arthouse*) seperti gedung Societeit di kompleks Taman Budaya Yogyakarta, Lembaga Indonesia Perancis yang sering memutar

film-film Perancis (Aryanto, 2015:10). Adapun bioskop alternatif lain yang pernah ada di Yogyakarta adalah Kinoki (2005 s/d 2010) yang diinisiasi oleh Elida Tamalagi. Kinoki memiliki program pemutaran film bulanan yang bertajuk “*Mari Menonton*” utamanya dalam mengapresiasi film pendek dan memiliki perpustakaan film pendek dan melakukan publikasi buletin/jurnal (Nugroho dan Herlina, 2013: 366). Adapun bioskop alternatif yang masih ada sampai sekarang, yang rutin diselenggarakan setiap bulannya, yaitu *Klub DIY Menonton(KDM)*. KDM pertama kali diselenggarakan pada bulan Maret, 2016. KDM di gawangi secara kolektif oleh 4 organisasi yang bergerak dibidang perfilman diantaranya, SAAP, Yuk Nonton, Paguyuban Filmmaker Jogja dan Simamat yang didukung oleh Seksi Perfilman, Dinas Kebudayaan DIY (<http://jogjafilm.com/id/news>).

### **C. JURNALISME FILM INDONESIA**

Majalah Kebudayaan IV edisi Januari-Februari pada tahun 1953 menuliskan berita dengan judul “*Produksi Film Cerita Indonesia: Perkembangan Sebagai Alat Masyarakat Indonesia*”. Di dalam berita tersebut dituliskan, bahwa keberadaan sinema pertama di Indonesia pada paruh pertama abad 20. Kehadiran sinema pertama dalam konteks transformasi politik, yang menandai beberapa perkembangan mendasar seperti etnis Cina, kehadiran film Amerika dan sensor Negara yang menjadi, dan bertahan sebagai ciri penentu industri film Indonesia (Sen: 2013: 26). Pada masa kolonialisme semua dikendalikan oleh Pemerintahan Belanda, begitu juga film. Belanda mendirikan perusahaan film di Indonesia pada pertengahan 1930-an bernama *Algemeen Nederlandsch-Indisch Film (ANIF)*. Pada tahun 1936 ANIF memproduksi film propaganda Indonesia pertama, *Tanah*

*Sebrang*. Disutradarai oleh pembuat film documenter Belanda, Mannus Franken. Perang di eropa yang mengganggu arus impor film ke Indonesia menyebabkan ledakan industri film di Indonesia dari rata-rata 1-5 judul per tahun antara tahun 1926- 1939, Jumlah film di Indonesia naik menjadi 13 judul di tahun 1940-an dan 41 judul di tahun 1941. Ketika Jepang masuk di Indonesia produksi film merosot drastis. Jepang melarang semua perusahaan film swasta dan memperkenalkan film sebagai alat propaganda (Sen, 2013: 33).

Pada masa kedudukan Jepang, ANIF di kendalikan oleh Jepang, yang dikendalikan oleh unit produksi Jepang, yang mempunyai pekerjaan utama membuat film berita (*newsreel*), yang bernama Nihon Eigasha. Perusahaan ini membuat delapan film fiksi, semua berisi propaganda Jepang (Kurosawa dalam Sen, 2013: 33). Usmar Ismail menuliskan artikel di majalah Star News edisi September 1954, bahwa dalam film, juga dalam bidang kehidupan lainnya, penyinkiran Cina dan Belanda memberi kesempatan yang lebih luas bagi pribumi Indonesia untuk berpartisipasi, yang bagi banyak orang merupakan pengalaman belajar yang luar biasa. Jepang memiliki pengetahuan tentang teknik film dan organisasi produksi yang lebih baik dibandingkan produser Cina di Indonesia, Artikel di Majalah ini berjudul “*Sari Soal Film-Film Indonesia*”.

Dalam tulisan-tulisannya Usmar Ismail jarang menyebut bahwa ia pernah bekerja untuk Belanda selama masa revolusi nasional. Dalam satu artikel yang ditulis tahun 1963 ia mengaku bahwa selama bekerja di *South Pacific Film Company* (SPFC) ia merasa kurang bebas berkarya sesuai dengan keinginan. Dalam tulisan awalnya, Usmar menyatakan bahwa karyanya di SPFC membawa

perubahan penting dalam sinema Indonesia sebagai bentuk seni. Tulisan tersebut dimuat dalam Majalah Intisari pada 17 Agustus 1963 dengan judul “*Film Saya yang Pertama*” (Sen, 2013: 35).

Di awal perkembangan film di Indonesia isu-isu yang sering diangkat menjadi produk jurnalisme salah satunya mengenai sensor film seperti dalam Majalah Kebudayaan tahun 1953 (dalam Sen, 2013: 42), yang berisi tentang pengalaman Usmar dengan sensor sama sekali tidak istimewa, yang terjadi diawal tahun 1950-an. Armijn Pane Secara rinci menggambarkan sejauh mana film *Antara Bumi dan Langit* dipotong Panitia Pusat Sensor Film pada tahun 1951. Setahun sebelumnya Majalah Kebudayaan terbit dalam edisi khusus mengenai Kongres Kebudayaan Kedua di Bandung edisi Januari-maret tahun 1952. Tulisan dalam majalah tersebut berisi tentang bagaimana bentuk sensor film yang paling dapat diterima adalah sensor *negative* yang berarti sensor hanya boleh melarang film atau sebagian dari film itu, yang berbahaya bagi masyarakat, dan tidak mempunyai hak untuk menentukan apakah film itu baik atau buruk sebagai film (Sen, 2013: 44).

*Review* atau ulasan tentang film karya Bachtiar Siagian pernah dimuat di Harian Rakyat film tersebut berjudul Turang. Film tersebut bercerita tentang perlawanan penduduk Kampung Serabaya (tanah Karo) bersama para tentara gerilya melawan Belanda dalam revolusi 1945 (Sen, 2013: 74) Di tahun 1964 harian Partai Komunis Harian Rakyat memuat syair propaganda yang menjadi simbol perlawanan terhadap imperialisme, menggambarkan boikot film-film yang

berasal dari Amerika. Syair tersebut dibuat oleh Sitor Situmorang dan dimuat di halaman depan koran tersebut (Sen, 2013: 58).

Jurnalisme film pada masa pemerintahan Orde Lama berkaitan pada isu-isu seputar film propaganda yang dibuat oleh pemerintahan kolonialisme yang dimuat di beberapa majalah maupun surat kabar. Para penggiat film pun ikut berperan dalam menulis beberapa artikel di majalah yang berkaitan dengan film. Setelah masa kolonialisme berakhir isu-isu yang dimuat di koran maupun majalah terkait dengan sensor tentang film dan berita-berita tentang aksi pemboikotan film-film impor terutama yang berasal dari Amerika.

Di era pemerintahan baru atau orde baru, muncul film-film presiden, atau film-film yang dipesan oleh pemerintahan orde baru. Divisi siliwangi adalah kelompok pertama yang setelah peristiwa 1965 mensponsori film tentang mereka dalam kemerdekaan Indonesia dengan membuat film berjudul Mereka Kembali pada tahun 1972 dan Bandung Lautan Api pada tahun 1974 (Sen, 2013: 149). Pada tahun 1974 Jakob Sumarjono, seorang wartawan senior mengkritik pemerintahan Orde Baru mengenai film dengan melontarkan komentar tentang kesenjangan sosial ekonomi. Berita tersebut dimuat di Kompas pada 16 April 1974 dengan judul berita "*Image Indonesia dalam Film Nasional*" (Sen, 2013: 175)

Adapun film yang mengangkat Soeharto sebagai pahlawan yang pada saat itu menjadi presiden setelah Soekarno, film tersebut berjudul Janur Kuning. Film tersebut bercerita tentang perebutan kembali Yogyakarta dan berfokus pada Serangan Umum 1 Maret (Sen, 2013: 151). Sejak film tersebut diproduksi media

berkali-kali membahas dari mana prakarsa serangan itu berasal, seperti Tempo dengan judul "*Pak Harto Tentang 1 Maret*" edisi 9 November tahun 1985, Berita Buana pada 6 Juni 1979, Merdeka pada 4 Mei 1979 yang terbit 1 Maret 1980, memuat ulasan, bahwa setelah yogyakarta diduduki belanda, aksi gerilya tentara Indonesia meraih sukses besar dibawah kepemimpinan Soeharto, yang akhirnya mengambil keputusan melancarkan serangan siang hari di Yogyakarta untuk menunjukkan kemampuan tentara (Sen, 2013: 160). Dalam wawancara yang diterbitkan tempo empat tahun setelah pembuatan film, Presiden mengatakan bahwa serangan siang hari pada 1 Maret memiliki tujuan politik, meskipun berjalan hanya enam jam itu sangat penting (Sen, 2013: 161).

Di tahun 1982 tiga surat kabar yakni, Tempo, Kompas dan Topik membahas tentang film propaganda yang menggambarkan sosok Soeharto yang unik dan tidak dapat dibandingkan dengan anggota ABRI lainnya angkatan '45, film tersebut berjudul Serangan Fajar. Publisitas film tersebut tidak hanya menekankan validitas sejarahnya, tetapi juga sebagai karya seni yang indah. Dalam Kompas edisi 17 Januari 1982, hal tersebut diberitakan dengan judul "Ini Propaganda Patriotisme", lain halnya di surat kabar Topik edisi 7 pada tanggal 22 Februari, memberitakannya dengan judul "*Temon, Merangkai Episode*". Sedangkan Tempo edisi 22 Agustus 1982 melihat situasi tersebut diberitakan dengan judul berita "*Arifin dan Nyanyian Fajar*" (Sen, 2013: 172).

Di era sekarang jurnalisme film lebih bersifat hiburan bagi para pembacanya untuk sekedar mengisi waktu luang. Berita-berita tentang propogon film atau pergerakan film nasional sudah jarang sekali ditemukan dimedia-media indonesia.

Kurangnya slot film di setiap media terutama media cetak, membuat pemberitaan film tidak lebih dari hiburan semata. Film barangkali satu-satunya budaya pop yang memiliki masalah dengan kehadiran jurnalisme berkualitas. Wawancara praedar selalu hanya berfokus pada cerita filmnya. Sementara wartawan sulit melakukan wawancara dengan sineas atau actor setelah filmnya dirilis, karena percakapan seputar filmnya telah berkembang jauh. Liputan media yang selalu menggunakan pendekatan marketing tercerai berai, atau fenomena *junket* (barisan panjang antrian *interview* yang dilakukan sebelum film rilis). Dalam peliputan wartawan sering mendapat waktu yang singkat, dikarenakan pihak studio dan publishes lebih memilih liputan dibanyak media, dengan tujuan kuantitas dibanding kualitas ([https://www.vice.com/id\\_id/article/qvvpv/jurnalisme-film-gagal-menjalankan-fungsinya](https://www.vice.com/id_id/article/qvvpv/jurnalisme-film-gagal-menjalankan-fungsinya)).